

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.M. Harjana, Konflik Di Tempat Kerja, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Azizy, Qodri A., Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bell, Judith., Doing Your Research Project A Guide for first-time researchers in education and social science, Third Editin, Philadelphia: Open University Press Buckingham, 1999.
- Boer Manuna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Dasarona, Agus, Lingkaran Setan Perjuangan Hak Atas Tanah Rakyat Di Kecamatan Jayapura Utara Dalam Laporan Pengamatan Masalah Pertanahan Di Irian Jaya. Jayapura: Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD), 1994.
- Djion D., Agus. Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: Dirjend Agraria Dep. Dalam Negeri, 1982.
- Djopari, R.G. John, Pembrontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Emirson, Joni., Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Fauzi, Noer., Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: INSIST, KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadimulyo, Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djembatan, 1992.:
- , Menuju Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.
- Hartono, Sunaryati. C.F.G., Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni, 1994.
- Istanto, Sugeng, F., Hukum Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998.

- Kartika, Sandra., Gautama, Candra., Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Jakarta: Panitia Bersama Sarasehan dan Konggres Masyarakat Adat Nusantara 1999 dengan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 1999.
- Kusnoe, Moh, H. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis). Bandung: CV. Mandar Maju, 1992.
- Mamudji, Sri., Rahardjo, Hang., Teknik Menyusun Karya Ilmiah, Jakarta: FH UI, 1995.
- MD, Mahfud, Moh., Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: LP3ES Indonseia, 1998.
- , Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno., Beberapa Azas Pembuktian Perdata Dan Penerapannya Dalam Praktek, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- , Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muchsin, H., "Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pembaruan Agraria. Yogyakarta: 16 Juli 2002.
- dan Putra Fadillah., Hukum dan Kebijakan Publik, Malang: Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averroes Press, 20002.
- Murad, Rusmadi, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Alumni, 1991.
- Nasikun, Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Pakpahan, Moshedayan, dan Bactiar, Sony., Tanah Adat Di Daerah-Daerah Indonesia, Jakarta: Puslibang BPN, 1998.
- Pigay, Natalis, Decki. BIK., Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah Konflik Politik Di Papua. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Poerwanto, Hari., Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perpesktif Antropologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Poerwowidagdo, Judo, Strategi Pemberdayaan Untuk Rekognisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Dalam Masyarakat, Makalah disampaikan pada Semiloka Rekognisi Sebagai Penyelesaian Konflik Pertanahan. Yogyakarta: 27-28 September 1999.
- Pringgodigdo, A.G., Ensiklopedia Umum, Yogyakarta: Kanisius, 1973.
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rajagukguk, Erman., Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta: Candra Pratama, 2000.
- Rasjidi, Lili., Putra, Wyasa, I.B., Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1993.
- Ruwiasuti, Rita, Maria., Fauzi, Noer., dan Bahriadi, Dianto., Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah, Sistem Penguasaan Tanah, Sengketa dan Politik Hukum Agraria. Jakarta: KPA-INPI-Pact, 1998.
- , Sesat Berpikir Politik Hukum Agraria. Yogyakarta: INSIST PRESS, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000.
- Sairin, Syafri., Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Samangun, Hubertus., Instrumen Internasional Untuk Perlindungan Masyarakat Adat, dalam Mengugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Jakarta: Panitia Bersama Sarasehan dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 bekerjasama dengan LSPP, 1999.
- Sarjita, Perbedaan Persepsi Antara Masyarakat Hukum Adat dengan Fungsi Pemerintah Sebagai Salah Faktor Timbulnya Sengketa Hukum Tanah Di PTUN. Jakarta: PPLIH FHUI, 1995
- , Mengenal Ruilslag Barang Milik Pemerintah / Daerah (Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Tentang Ruilslag), Yogyakarta: STPN, 2001.
- , Upaya Pemerintah Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1998 Jo. Keputusan Ka. BPN Nomor 24 Tahun 2002, Yogyakarta: UPPM-STPN, 2002.

- , Urgensi Pengaturan Konsolidasi Tanah Dalam Bentuk Peraturan Pemerintah (Suatu Kajian dari Segi Politik Hukum Agraria), Yogyakarta: UPPM STPN, 2002.
- , Menguji Keppres RI Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Di Tinjau dari Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dan Penerapan Azas Penyelenggaraan Pemerintahan), Yogyakarta: STPN, 2003.
- dan Petric Adlay A.E. Ekel, Prosedur Pelaksanaan Ruilslag Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pelaksanaan Ruilslag Tanah dan bangunan Gudang Bulog Kelapa gading Jakarta Utara), Yogyakarta: UPPM STPN, 2003.
- Serpara, J.S., Masalah Tanah Yang Dihadapi Di Irian Jaya, Jayapura: Kanwil BPN Propinsi Irian Jaya, 1990.
- , Tanah Milik Siapa Suatu Masukan Bagi Konggres Gereja dan Masyarakat Wilayah Irian Jaya, Jayapura: Kanwil BPN Irja, 1992.
- , Masalah Tanah Strategis Di Provinsi Irian Jaya, Jayapura: Kanwil BPN Provinsi Irian Jaya, 1996.
- Soekanto, Masyarakat Adat Di Jawa dan Madura, Yogyakarta: Proyek Kerjasama Departemen Dalam Negeri – UGM, 1976.
- , Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 1986.
- , Hukum Adat Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Soeleiman, Makmoen., “Tanah Adat Kenyataan Empiris Implementasi Hukum Tanah Nasional Di Sumatera Selatan”, Makalah disampaikan pada Pertemuan kakanwil BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Se-Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung Dalam Rangka Penyusunan Data Pertanahan untuk Menunjang Kaeasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN. Palembang: 12-13 Nopember 1996.
- Soetiknjo, Iman., Proses Terjadinya UUPA Peranserta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

- , Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Soetrisno, Loekman, Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Azasi Manusia. Yogyakarta: LAPERA, 1991.
- , Konflik Sosial Studi Kasus Indonesia, Yogyakarta: Tajidu Press, 2003.
- Sudiyat, Iman., Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sumardjono, Maria, S.W., "Studi Banding Antara Hak Ulayat dengan Hak Menguasai Negara", Makalah disampaikan pada Diskusi dalam rangka Proyek Kerjasama Departemen Dalam Negeri-UGM, Yogyakarta: 26-27 April 1976.
- , Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: 1989.
- , dan Ismail, Nurhasan., Studi Tentang Hukum Adat Pertanahan Irian Jaya. Yogyakarta: Laporan Penelitian Kerjasama FH UGM-BPN, 1997.
- , Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM), Yogyakarta: 1998.
- , Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Supomo, Bab Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Suseno, Magnis, Franz., Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- The Liang, Gie., Istanto, Soegeng, F., Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat Dan Kemungkinan Perkembangan Otonominya Di Hari Kemudian, Djilid I, Yogyakarta: Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik UGM, 1968.
- , Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat Dan Kemungkinan Perkembangan Otonominya Di Hari Kemudian, Djilid II, Yogyakarta: Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik UGM, 1968.

Usman, Sunyoto, "Rekognisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Tinjauan Sosisologi Hukum", Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Rekognisi Sebagai Penyelesaian konflik Pertanahan: Tinjauan Hukum, Sosial, Politik dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Yogyakarta, 27-28 September 1999.

Wargakusumah, Moh. Hasan, Pengaturan Penguasaan Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional Dan Di Kawasan Industri, Yogyakarta: Disertasi, Fakultas Pascasarjana UGM, 2003.

Widjaja, Gunawan., Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Wignjosebroto, Soetandyo, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Zubair, Charris, Achmad., Dimensi Etik dan Askestik Ilmu Pengetahuan Manusia Kajian Filsafat Ilmu, Yogyakarta: LESFI, 2002.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat:

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. UU No.5 Tahun 1960 LN No. 104 Tahun 1960, TLN. No. 2053.

Indonesia. Undang Undang Tentang Persetujuan Antara Pemerintah Kerajaan Belanda Dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Soal-Soal Keuangan. UU No. 7 Tahun 1966. TLN. Tahun 1966 No.34. TLN No.-

Indonesia. Undang Undang Tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. UU No. 18 Tahun 2001 TLN No.114 Tahun 2001. TLN. No.4134.

Indonesia. Undang Undang Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU No. 21 Tahun 2001 LN. 135 Tahun 2001. TLN. No. 4151.

- Indonesia. Keputusan Presiden Tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat. Keppres Nomor 32 Tahun 1979.
- Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan. Keppres No. 34 Tahun 2003 LNRI. No.34 Tahun 2003.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria di Propinsi Irian Barat. PMDN No. 8 Tahun 1971.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. PMDN NO. 3 Tahun 1979.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah. PMDN No. 3 Tahun 1997.
- Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Permenag/Ka. BPN No. 1 Tahun 1999.
- Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. PMNA/Ka. BPN No.5 Tahun 1999.
- Menteri Dalam Negeri. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Batas Waktu Pendaftaran Konversi Bekas Hak Barat di Propinsi Irian Jaya. SK No.59/DJA/1973.
- Menteri Dalam Negeri. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Batas Akhir Jangka Waktu Konversi Bekas Hak Barat di Provinsi Irian Jaya. SK No. 21/DJA/1980.
- Badan Pertanahan Nasional. Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Instruksi Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2000.
- Aceh. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Konflik hak ulayat masyarakat hukum adat kampung Kajoe Poeloe dan Kajoe Batoe dengan pemerintah kota

Jayapura provinsi Papua

SARJITA, H. Sudjito, S.H., M.Si

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

7 Tahun 2000. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32.

Sumatera Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 13.

Irian Jaya. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Bekas Hak Hak Indonesia Atas Tanah Di Propinsi Irian Jaya. Kep. Gubernur Irja Nomor 247 Tahun 1988. Lembaran Daerah Tahun 1988 No. 67.